



Pemkot Diminta Kaji Ulang Penyertaan Modal Pihak Ketiga

PONTIANAK, SP - Anggota DPRD Kota Pontianak, Yandi meminta Pemerintah Kota Pontianak melakukan pengkajian ulang terhadap rencana untuk menambah penyertaan modal kepada pihak manapun. Sebab, anggaran

penambahan penyertaan modal belum menjadi skala prioritas untuk pembangunan Kota Pontianak.

“Kita minta Pemerintah Kota Pontianak untuk mengkaji kembali rencana penyertaan modal kepada pihak ketiga,” ucap Yandi

• Baca Halaman 15

Hal 9 ■ pemkot diminta

saat diwawancarai usai paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda RAPBD Kota Pontianak tahun 2020 di Gedung DPRD Kota Pontianak pada Rabu (13/11).

Dirinya menyebutkan pada tahun ini rencananya akan disertakan sekitar Rp10 miliar di Bank Kalbar. Ia akan meminta dampak penyertaan modal terhadap pertumbuhan di masyarakat. Menurutnya akan lebih baik anggaran itu diarahkan kepada pembangunan yang bersentuhan langsung bagi kepentingan masyarakat miskin.

Yandi menambahkan pengkajian tersebut harus dilakukan karena posisi keuangan Kota Pontianak saat ini tengah mengalami defisit. Kemudian penyertaan modal ini cenderung hanya menguntungkan segelintir orang.

pendapatan daerah yang sah,” tambahnya.

Ia juga meminta Pemkot Pontianak membuat perencanaan pemetaan potensi daerah yang dapat diukur setiap tahun. Hal tersebut untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menetapkan PAD.

Kemudian juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan perkembangan digital dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah agar dapat menekan kebocoran-kebocoran yang ada.

Dirinya menyebutkan belanja pemerintah pada anggaran perubahan 2019 mengalami peningkatan, hal tersebut sebaiknya dapat diarahkan pada kepentingan masyarakat.

“Penyelesaian pembangunan jalan dan drainase khususnya di daerah pinggiran juga harus menjadi perhatian,” pungkasnya.

Dirinya menyampaikan harusnya pemerintah ketika masyarakat membayar pajak dipergunakan untuk membangun, bukan dibantu untuk menabung. Akhir pemerintahan mengejar proses menyiapkan dana untuk disertakan dalam penyertaan modal yang berakibat prioritas lain tidak terlaksana dengan baik.

“Kita akan kaji kembali benefit dari yang telah disertakan,” kata Yandi.

Yandi juga mengatakan RAPBD 2020 merupakan perencanaan keuangan tahun pertama dari periode RPJMD Kota Pontianak tahun 2019-2024. Oleh karena itu, seluruh alokasi anggaran untuk melaksanakan program pembangunan yang akan diwujudkan pada 2020 diharapkan mampu mencapai target-target indikator pembangunan daerah Kota Pontianak.

Indikator keberhasilan tersebut meliputi Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik.

Ia mengatakan, pengalokasian anggaran dan penentuan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan disertai asumsi yang mendasarinya.

Dirinya meminta agar Wali Kota Pontianak dan dinas terkait dalam menentukan kebijakan agar tetap mengacu pada visi Kota Pontianak.

“Pemkot harus terus memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target-target indikator keberhasilan pembangunan yang telah ditetapkan,” jelasnya.



Yandi menambahkan seluruh target kinerja yang akan telah dan akan dicapai semestinya dapat diakses dan diinformasikan kepada publik dengan dukungan data yang jelas. Sebab, kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintahan daerah tidak hanya disampaikan kepada pemerintah dan DPRD tetapi juga ke publik.

Dari struktur RAPBD Kota Pontianak tahun anggaran 2020 beberapa hal menjadi catatan. Di antaranya mendorong Pemerintah Kota Pontianak untuk terus berupaya menggali dan meningkatkan potensi pendapatan daerah secara intensif dan ekstensif tanpa mengabaikan sektor dunia usaha.

“Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta pengoptimalan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan pandangan umum yang telah disampaikan pada prinsipnya meminta kepada Pemkot Pontianak untuk merealisasikan pembangunan yang menyentuh masyarakat langsung. Hal tersebut agar pemanfaatannya lebih nampak dan transparan kepada masyarakat.

Kemudian, masalah gedung parkir diakuinya juga terjadi keterlambatan. Hal tersebut karena mekanisme pelelangan dan kajian dalam proses operasional. Dalam waktu dekat dirinya memastikan akan dilakukan uji coba.

“Pada tahap pertama gedung parkir akan digratiskan selama satu bulan,” ucapnya.

Bahasan menyebutkan untuk proses pembangunan jalan paralel juga perlu penyelesaian yang bersifat hati-hati. Dalam penyelesaian pembebasan tidak akan dilakukan secara terburu-buru. **(din/bah)**